

LAPORAN KEUANGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2024

Jalan Jend. Sudirman No. 13 Tanah Grogot
Tana Paser


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser adalah salah satu entitas akuntansi di bawah kementerian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kab. Paser mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah – kaidah pengelolaan Keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tana Paser, 06 Mei 2025

Sekretaris

Rusdiansyah, SH
NIP. 19690825 199603 1 003

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan Penting Lainnya	33
VI. Lampiran dan Daftar	34
- Laporan Realisasi Anggaran	
- Neraca	
- Laporan Operasional	
- Laporan Perubahan Ekuitas	
- Laporan Realisasi Anggaran Belanja	
- Laporan Realisasi Pengembalian Belanja	
- Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	
- Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah	
- Laporan Posisi BMN di Neraca	
- Register Transaksi Pembelian	
- Register Transaksi harian Persediaan Masuk (Pembelian)	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

Jalan Jend. Sudirman No. 13 Tanah Grogot

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2024 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tana Paser, 06 Mei 2025



Sekretaris

Rusdiansyah, SH

NIP. 19690825 199603 1 003

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Semester 1 Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 31 Desember 2024

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 13.271.252,- dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 45.802.798.192,- atau mencapai 99,41 % persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 46.073.490.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:"

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran periode 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	PER 31 Desember 2024			TA 2023
	Anggaran	Realisasi	% Real. thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	13.271.252	0	-
Belanja Negara	46.073.490.000	45.802.798.192	99,41	27.642.319.663

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Per 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024

Nilai Aset Per 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 7.955.961.590,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 7,955,961,590,- dan Aset Tetap sebesar Rp. 1.237.092.202,- (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 2.157.888.738,- dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp. 0

Nilai Kewajiban dan Ekuitas Per 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 412.390,- dan Rp. 9.192.641.402,-

Ringkasan Neraca per 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai

Uraian	31 Des 2024	2023	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	7.955.961.590	14.348.148.101	(6.392.186.511)	(44,55)
Aset Tetap	1.237.092.202	911.156.070	325.936.132	35,77
Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Aset	9.193.053.792	15.259.304.171	(6.066.250.379)	(39,75)
Kewajiban				
Hibah Yang Belum disahkan	-	0	-	-
Kewajiban Jangka Pendek	412.390	47.842.570	(47.430.180)	(99,14)
Jumlah Kewajiban	412.390	47.842.570	(47.430.180)	-
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana	9.192.641.402	15.211.461.601	(6.018.820.199)	(39,57)
Jumlah Ekuitas Dana	9.192.641.402	15.211.461.601	(6.018.820.199)	(39,57)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	9.193.053.792	15.259.304.171	(6.066.250.379)	(39,75)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 13.271.252,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 47.983.956.981,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 47.970.685.729,-). Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp. 0,-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0,- dan defisit sebesar (Rp. 47.829.245.729,-) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 47.829.245.729,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 956.992.279,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 11.474.186.643). kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 11.167.235.039,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 650.040.675,-

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024

Uraian	31 Des' 2024	2023	Kenaikan/ (penurunan)	
			(Rp)	%
Ekuitas Awal	15.211.461.601	956.992.279	14.254.469.322	1.489,51
Surplus / Defisit-LO	-47.829.245.729	-27.056.900.941	-20.772.344.788	76,77
Koreksi	-13.271.252	-1.396.661	-11.874.591	-
Transaksi Antar Entitas	41.823.696.782	41.312.766.924	510.929.858	1,24
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	6.018.820.199	14.254.469.322	-8.235.649.123	(57,78)
Ekuitas Akhir	9.192.641.402	15.211.461.601	(6.018.820.199)	(39,57)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024 DAN TAHUN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Per 31 Des 2024		% thd Angg	TA 2023
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	13.271.252	0,00%	6.849.911
JUMLAH PENDAPATAN		0	13.271.252	0,00%	6.849.911
BELANJA					
Belanja Pemerintah Pusat	B.2	46.073.490.000	45.802.798.192	99,41%	27.642.319.663
Belanja Pegawai	B.3	2.431.113.000	2.431.073.527	100,00%	2.279.701.853
Belanja Barang	B.4	43.096.177.000	42.825.612.705	99,37%	25.228.335.810
Belanja Modal	B.5	546.200.000	546.111.960	99,98%	134.282.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	0	0	0,00%	0
Belanja Hibah	B.7	0	0	0,00%	0
Jumlah Belanja Operasi		46.073.490.000	45.802.798.192	99,41%	27.642.319.663
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.7	0	0	0,00%	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.8	0	0	0,00%	0
Belanja Gedung dan Bangunan	B.9	0	0	0,00%	0
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.10	0	0	0,00%	0
Belanja Modal lainnya	B.11	0	0	0,00%	0
Jumlah Belanja Modal		0	0	0,00%	0
JUMLAH BELANJA		46.073.490.000	45.802.798.192	99,41%	27.642.319.663

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024 DAN TAHUN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DES 2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	7.820.167.520	12.513.271.252
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.8	135.794.070	316.852.830
Persediaan	C.9	0	1.518.024.019
Jumlah Aset Lancar		7.955.961.590	14.348.148.101
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.13	0	0
Peralatan dan Mesin	C.14	2.921.493.940	2.229.736.980
Gedung dan Bangunan	C.15	473.487.000	473.487.000
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.16	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.17	0	0
Kontruksi dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	-2.157.888.738	-1.792.067.910
Jumlah Aset Tetap		1.237.092.202	911.156.070
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	0	0
Aset Lain-Lain	C.21	563.661.500	563.661.500
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.22	-563.661.500	-563.661.500
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		9.193.053.792	15.259.304.171
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hibah Yang Belum Disahkan	C.23	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.24	0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.25	412.390	47.842.570
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.27	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		412.390	47.842.570
JUMLAH KEWAJIBAN		412.390	47.842.570
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	9.192.641.402	15.211.461.601
JUMLAH EKUITAS DANA		9.192.641.402	15.211.461.601
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		9.193.053.792	15.259.304.171

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2024	TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Pendapatan Pajak Penghasilan		0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		0	0
Pendapatan Cukai		0	0
Pendapatan Pajak Lainnya		0	0
Pendapatan Bea Masuk		0	0
Pendapatan Bea Keluar		0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan		0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		13.271.252	20.120.567
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		13.271.252	20.120.567
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah		0	0
Jumlah Pendapatan Hibah		13.271.252	20.120.567
Jumlah Pendapatan		0	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		13.271.252	20.120.567
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2.383.470.027	2.279.701.853
Beban Persediaan	D.3	2.948.207.308	103.801.100
Beban Barang dan Jasa	D.4	34.605.445.319	20.219.719.301
Beban Pemeliharaan	D.6	129.739.153	67.564.990
Beban Perjalanan Dinas	D.7	7.551.274.346	4.178.360.311
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	0	0
Beban Bunga		0	0
Beban Subsidi		0	0
Beban Hibah		0	0
Beban Bantuan Sosial	D.9	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	365.820.828	227.874.549
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	0	0
Beban Transfer		0	0
Beban Lain-Lain	D.12	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		47.983.956.981	27.077.022.104
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-47.970.685.729	-27.056.901.537
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.12		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
425792 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		141.440.000	596
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		145.645.000	596
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4.205.000	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		141.440.000	596
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	
POS LUAR BIASA	D.13		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-47.829.245.729	-27.056.900.941
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		-47.829.245.729	-27.056.900.941

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024
DAN TAHUN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	956.992.279	956.992.279
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(27.070.172.193)	(27.056.900.941)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN		0	0
AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3	13.271.252	1.396.661
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.5	0	-
Lain-lain	E.6	13.271.252	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	41.823.696.782	41.312.766.924
Diterima dari Entitas Lain		0	0
Ditagihkan kepada Entitas Lain		0	0
Pngesahan Pengembalian Hibah Langsung		0	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		13.387.393.545	(199.503.385)
EKUITAS AKHIR		14.344.385.824	956.992.279

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum**

Dasar hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 13 Tanah Grogot.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser mempunyai tugas dan fungsi memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser mempunyai tugas dan fungsi memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan Untuk mewujudkan visi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga
- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga."

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan satker dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik dan spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh yang merupakan entitas pelaporan dari. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan."

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan satker adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersembahkan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri keuangan No. 01/PMK.06/013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Berbasis Akrua
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp. 13.271.252,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir Periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 13.271.252,- dan Rp. 6.849.811,- dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 DESEMBER 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Jasa	0	0	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	13.271.252	0,00
Jumlah	0	13.271.252	0,00

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Negara bukan Pajak dari Penerimaan Jasa Giro Anggaran Pilkada Paser Tahun 2024 bulan Desember 2023 sebesar Rp. 13.271.252,- yang dibayar pada tanggal 4 Januari 2024

Perbandingan Realisasi PNPB Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI PER 31 DES 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0,00
Pendapatan Lain-Lain	13.271.252	6.849.911	51,61
Jumlah	13.271.252	6.849.911	51,61

Rincian pendapatan Negara bukan Pajak dari Penerimaan Jasa Giro Anggaran Pilkada Paser Tahun 2024 bulan Desember 2023 sebesar Rp. 13.271.252,- adalah sebagai berikut :

BULAN	Jumlah (Rp.)	Ket.
Penerimaan Jasa Giro Anggaran Pilkada Paser 2024 bulan Desember 2023	13.271.252	
Jumlah	13.271.252	

Realisasi Belanja
Rp. 45.802.798.192,-

B.2. Belanja

Realisasi belanja KPU Kabupaten Paser pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 45,802,798,192,- dan Rp. 27.642.319.663,- atau 50,70 persen dari anggaran senilai Rp. 22.024.326.000,-. Rincian Anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pemerintah Pusat	46.073.490.000	45.802.798.192	99,41
Belanja Pegawai	2.431.113.000	2.431.073.527	100,00
Belanja Barang	43.096.177.000	42.825.612.705	99,37
Belanja Modal	546.200.000	546.111.960	99,98
Belanja Hibah	-	-	0,00
Belanja modal dari Hibah	-	-	0,00
Total Belanja Kotor	46.073.490.000	45.802.798.192	99,41
Pengembalian Belanja	-	-	-
Belanja Netto	46.073.490.000	45.802.798.192	99,41

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 65,70 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya realisasi anggaran Belanja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DES 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pemerintah Pusat	45.802.798.192	27.642.319.663	65,70
Belanja Pegawai	2.431.073.527	2.279.701.853	6,64
Belanja Barang	42.825.612.705	25.228.335.810	69,75
Belanja Modal	546.111.960	134.282.000	306,69
Belanja Hibah	-	-	0,00
Belanja modal dari Hibah	-	-	0,00
Total Belanja Kotor	45.802.798.192	27.642.319.663	65,70

Belanja Pegawai
Rp. 2.431.073.527,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Rp. 2.279.701.853,- pada 31 Desember 2024 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) ;Belanja Honorarium; dan Belanja Vakasi. Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar 2.431.073.527,- dan Rp. 2.279.701.853,-. Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,64 persen dari realisasi belanja 30 Desember 2023. Hal ini disebabkan Belanja Belanja Pegawai, Belanja uang makan, Tunjangan Kinerja tahun 2024 lebih besar daripada tahun 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DES 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	670.933.700	612.608.300	9,52
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.969	9.857	(9,01)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	35.773.000	32.694.580	9,42
Belanja Tunj. Anak PNS	11.247.528	9.969.736	12,82
Belanja Tunj. Struktural PNS	47.880.000	47.880.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	-
Belanja Tunj. PPh PNS	4.722.403	1.095.100	331,23
Belanja Tunj. Beras PNS	31.792.380	31.430.280	1,15
Belanja Uang Makan PNS	71.215.000	92.068.000	(22,65)
Belanja Tunj. Lain-lain PNS	0	0	-
Belanja Tunj. Umum PNS	20.370.000	20.370.000	-
Belanja Vakasi	0	0	-
Belanja Uang Lembur	0	0	-
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	808.910.640	812.730.500	(0,47)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	728.220.195	618.845.500	17,67
Realisasi Belanja Bruto	2.431.073.815	2.279.701.853	6,64
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>288</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
Realisasi Belanja Netto	2.431.073.527	2.279.701.853	6,64

Belanja Barang Rp.
42.825.612.705,-

B.4 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 42.825.612.705,- dan Rp. 25.228.335.810,- Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2024 mengalami Kenaikan 69,75 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023 . Hal ini disebabkan adanya Realisasi Anggaran Badan Adhoc (PPK, PPS dan KPPS) berupa Belanja Bahan, Belanja Honorarium dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya dalam Pemilu 2024 dan Pembiayaan Anggaran Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DES 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	169.335.246	192.479.000	(12,02)
Belanja Barang Non Operasional	27.260.035.574	19.717.221.859	38
Belanja Jasa	6.916.641.119	259.307.522	#####
Belanja Sewa	78.201.300	367.477.520	(78,72)
Belanja Pemeliharaan	129.739.153	67.564.990	92,02
Belanja Perjalanan Dinas	7.551.274.346	4.178.360.311	80,72
Belanja Persediaan	720.385.967	445.924.608	61,55
Realisasi Belanja Bruto	42.825.612.705	25.228.335.810	69,75
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	42.825.612.705	25.228.335.810	69,75

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp.
546,111,960,-

B.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 546.111.960,- dan Rp. 134.282.000,-. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 mengalami Kenaikan sebesar 32,03 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022. Hal ini disebabkan adanya belanja modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2023 sebagai penunjang Pemilihan Umum Tahun 2024

Kas di
Bendahara
Pengeluaran Rp.
0,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	31 DES 2024	T.A. 2023
1	BPG 047 KPU KABUPATEN PASER No. Rekening 8100126589021000	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
3.	Kuitansi UP yang belum di SP2D-kan	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp.
7.820.167.520,-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 7.820.167.520,- dan Rp. 12.513.271.252,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	31 DES 2024	T.A. 2023
Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang Belum Disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	-	-
Saldo Dana Hibah Pilkada Tahun 2024	7.820.167.520	-
Jumlah	7.820.167.520	-

Pada Aplikasi Sakti Sisa Dana Hibah dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran dengan Tunai tetapi sebenarnya saldo tersebut ada direkening Bendahara Hibah agar dapat migrasi saldo awal ke tahun 2025 dan dapat memberikan uang muka ke Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Hibah agar dapat mencatat perintah bayar, kwitansi hibah, membuat usulan DRPP Hibah dan Pengajuan Pengesahan Belanja Hibah Tahun 2025.

Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp. 135.794.070,-

C.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan biaya sewa 2 (dua) gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Paser yang dibayar dimuka dari bulan 01 Januari 2024 sampai dengan 5 Oktober 2025

Rincian sumber Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Jenis	31 DES 2024	T.A. 2023
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	135.794.070	316.852.830
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	135.794.070	316.852.830

Belanja dibayar dimuka (Prepaid) berasal dari 2 (dua) unit Sewa Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 selama 9 (sembilan) bulan dari Tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Oktober 2025 adalah sebesar Rp. 66.383.550,- dan Rp. 69.410.520,- jadi jumlahnya Rp. 135.794.070,-

Persediaan Rp. 0,-

C.4. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

Persediaan	31 DES 2024	T.A. 2023
Barang Konsumsi	-	-
Bahan Baku	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Tanah
Rp. 0

C.4. Tanah

Tidak terdapat Nilai Aset tetap berupa tanah yang dimiliki kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, karena Tanah yang digunakan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dengan status pinjam pakai.

Peralatan dan
Mesin Rp.
2,921,493,940,-

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 2,921,493,940,- dan Rp. 2.229.736.980,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.229.736.980
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- hibah	Rp	691.756.960
- reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
- penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.921.493.940
Akumulasi Penyusutan s.d per 31 Desember 2024	Rp	2.063.084.838
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	Rp	858.409.102

Peralatan dan mesin diperoleh dari pengadaan pada anggaran Hibah Pilkada Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Reward Bank yang berasal dari dana Hibah

Gedung dan
Bangunan Rp.
473.487.000

C.6. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 473.487.000 dan Rp. 473.487.000,-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	473.487.000
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	473.487.000
Akumulasi Penyusutan s.d. Per 31 Desember 2024	Rp	94.803.900
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	Rp	378.683.100

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap (Rp.
2.157.888.738)

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp. 2.157.888.738) dan (Rp. 1.792.067.910)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.921.493.940	2.063.084.838	2.150.884.183
2	Gedung dan Bangunan	473.487.000	94.803.900	378.683.100
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	563.661.500	563.661.500	-
Akumulasi Penyusutan		3.958.642.440	2.721.550.238	2.529.567.283

Aset Lain-Lain
Rp. 563.661.500,-

C.8. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023+B121 adalah masing-masing sebesar Rp. 563.661.500,- dan Rp. 563.661.500,-

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	563.661.500
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN	Rp	-
Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	563.661.500
Akumulasi Penyusutan	Rp	563.661.500
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	-

Rincian Aset Lain- Lain

Nama Barang	Satuan	Harga Barang	Jumlah
Mini Bus (Toyota)	1 Unit	Rp 119.300.000	Rp 119.300.000
Mini Bus (Daihatsu)	1 Unit	Rp 143.000.000	Rp 143.000.000
Sepeda Motor	1 Unit	Rp 7.400.000	Rp 7.400.000
Scanner	1 Unit	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
Alat Pemotong Kertas	1 Unit	Rp 400.000	Rp 400.000
Meja Kerja Kayu (Solit)	1 Unit	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
AC Split	5 Unit	Rp 3.000.000	Rp 15.000.000
AC Uchida	2 Unit	Rp 3.750.000	Rp 7.500.000
Tape Recorder	1 Unit	Rp 500.000	Rp 500.000
Tape Recorder	1 Unit	Rp 1.050.000	Rp 1.050.000
DVD Player	1 Unit	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000
Uninterruptible Power Suply (UPS)	3 Unit	Rp 455.000	Rp 1.365.000
Facsimile	1 Unit	Rp 2.750.000	Rp 2.750.000
\	1 Unit	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000
Stabilizer/UPS	4 Unit	Rp 1.045.000	Rp 4.180.000
PC unit	10 Unit	Rp 12.980.000	Rp 129.800.000
PC unit	1 Unit	Rp 9.950.000	Rp 9.950.000
Laptop Acer	1 Unit	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
Notebook Toshiba	1 Unit	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000
Notebook Toshiba	2 Unit	Rp 6.250.000	Rp 12.500.000
Serial Printer	1 Unit	Rp 3.896.000	Rp 3.896.000
Serial Printer	2 Unit	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
Serial Printer	1 Unit	Rp 4.750.000	Rp 4.750.000
Serial Printer laserjet enterprise	2 Unit	Rp 12.250.000	Rp 24.500.000
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit	Rp 2.922.000	Rp 2.922.000
Printer (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit	Rp 91.000	Rp 91.000
Printer Canon Pixma IP 1800	7 Unit	Rp 750.000	Rp 5.250.000
Hub d-link	1 Unit	Rp 485.000	Rp 485.000
Modem	1 Unit	Rp 450.000	Rp 450.000
Switch TP Link	1 Unit	Rp 922.500	Rp 922.500
Root	1 Unit	Rp 550.000	Rp 550.000
Jumlah			Rp 563.661.500

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp.
563.661.500)

C.9. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah (Rp. 563.661.500) dan (Rp. 563.661.500)

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2022

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
Aset Lain-lain	Rp 563.661.000	Rp (563.661.000)	Rp -
Jumlah	Rp 563.661.000	Rp (563.661.000)	Rp -

Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama periode sampai dengan per 31 Desember 2024 dan 2023

Hibah Yang
Belum Disahkan
Rp. 0,-

C.10. Hibah Yang Belum Disahkan

Saldo Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Hibah Yang Belum Disahkan merupakan Dana Hibah yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada KPU Kabupaten Paser untuk membiayai Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser, pada tahun 2023 KPU Kabupaten Paser tidak mendapat Hibah dari

Uang Muka dari KPPN Rp. 0,-

C.11. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp. 412.390,-

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 412.390,- dan Rp. 47.756.340,-

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp	
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp	-
3	Utang kepada Pihak Ketiga lainnya	Rp	412.390
	Tagihan Rekening Air bulan Desember 2024		
Total		Rp	412.390

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp. 0,-

C.13. Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan belanja barang melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) yang belum di SP2D-kan.

Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Barang UP Tunai belum di SP2D-kan	Rp	-
2.	Belanja Barang UP KKP belum di SP2D-kan	Rp	-
Total		Rp	-

Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 0

C.13. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp	-
2		Rp	-
3		Rp	-
4		Rp	-
5		Rp	-
6		Rp	-
7		Rp	-
Total		Rp	-

Ekuitas Rp. 9.192.641.402,-

C.14. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 9.192.641.402,-,- dan Rp. 15.211.461.601,-

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp.
13.271.252,-

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 13.271.252,- dan Rp. 20.120.567,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DES 2024	TAHUN 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa	Rp -	Rp -	0,00
Pendapatan Lain-lain	Rp 13.271.252	Rp 20.120.567	34,01
Jumlah	Rp 13.271.252	Rp 20.120.567	34,01

Pendapatan Lain - lain sebesar Rp. 13.272.252,00 berasal dari Jasa Giro bulan Desember 2024 Hibah Pilkada Tahun 2024 dibayarkan tanggal 4 Januari 2025

Beban Pegawai
Rp.
1.774.984.684,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Per 3 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 1.774.984.684,- dan Rp. 1.774.056.331,-

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DES 2024	TAHUN 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	670.933.700	612.608.300	5,79
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.681	9.857	17,01
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	35.773.000	32.694.580	16,97
Belanja Tunj. Anak PNS	11.247.528	9.969.736	10,26
Belanja Tunj. Struktural PNS	47.880.000	47.880.000	9,62
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	-
Belanja Tunj. PPh PNS	4.722.403	1.095.100	22,47
Belanja Tunj. Beras PNS	31.792.380	31.430.280	4,89
Belanja Uang Makan PNS	71.215.000	92.068.000	(10,83)
Belanja Tunj. Lain-lain PNS	0	0	-
Belanja Tunj. Umum PNS	20.370.000	20.370.000	(12,99)
Belanja Vakasi	0	0	-
Belanja Uang Lembur	0	0	-
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	808.910.640	812.730.500	2,23
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	680.616.695	618.845.500	-100
Realisasi Belanja Bruto	2.383.470.027	2.279.701.853	6,19
Pengembalian Belanja	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	2.383.470.027	2.279.701.853	6,19

Beban Persediaan
Rp.
2.948.207.308,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 2.948.207.308,- dan Rp. 103.801.100,-

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2024	TAHUN 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	Rp 9.872.000	Rp 103.801.100	-90,49
Beban Persediaan Bahan Baku	Rp 2.938.335.308	Rp -	0,00
Beban Persediaan Bahan untuk			

Beban Barang
dan Jasa Rp.
34.605.445.319,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 34.605.445.319,- dan Rp. 20.219.719.301,-

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DES 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Barang Operasional	Rp 85.245.246	Rp 44.575.000	-34,64
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp -	Rp 487.000	-68,49
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 68.940.000	Rp 137.340.000	21,28
4	Beban Barang Operasional Lainnya	Rp 15.150.000	Rp 10.077.000	-100,00
6	Beban Bahan	Rp 7.430.506.530	Rp 2.148.970.850	20.180
7	Beban Honor Output Kegiatan	Rp 12.075.828.000	Rp 15.479.350.000,00	224.937
8	Beban Barang Non Operasional lainnya	Rp 7.643.351.044	Rp 2.088.901.009	0,00
	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Rp 110.350.000		
10	Beban Langganan Listrik	Rp 23.142.727	Rp 48.021.140	73,22
11	Beban Langganan Telepon	Rp 5.606.370	Rp 551.488	-82,25
12	Beban Langganan Air	Rp 1.435.540	Rp 2.259.354	-5,00
13	Beban Sewa	Rp 259.260.060	Rp -	0,00
14	Beban Jasa Profesi	Rp 96.585.000	Rp 50.624.690	0,00
15	Beban Jasa Lainnya	Rp 6.790.044.802	Rp 208.561.770	898,22
16	Beban Jasa Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp -		0,00
	Jumlah	Rp 34.605.445.319	Rp 20.219.719.301	7.827

Beban
Pemeliharaan Rp.
129.739.153,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 129.739.153,- dan 67.564.990,-

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Desember 2024 dan 2023

No.	URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DES 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 13.655.000	Rp 8.780.000	55,52
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 116.084.153	Rp 58.784.990	97,47
3	Beban Pemeliharaan Lainnya	Rp -	Rp -	-
	Jumlah	Rp 129.739.153	Rp 67.564.990	92,02

Beban Perjalanan
Dinas Rp.
7.551.274.346,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 7.551.274.346,- dan Rp. 4.178.360.311,-

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DES 2024	TAHUN 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	Rp 1.388.678.014	Rp 862.440.342	61,02
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 1.275.886.700	Rp 496.865.500	156,79
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 3.419.810.610	Rp 2.098.812.000	62,94
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 1.466.899.022	Rp 720.242.469	103,67
	Jumlah	Rp 7.551.274.346	Rp 4.178.360.311	80,72

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 365.820.828,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 365.820.828,- dan Rp. 227.874.549,-

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	PER 31 DES 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 353.265.508	Rp 215.319.229	64,07
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 12.555.320	Rp 12.555.320	0,00
	Jumlah Penyusutan	Rp 365.820.828	Rp 227.874.549	60,54
1.	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	
2.	Beban Penyusutan aset lain-lain	Rp -	Rp -	
	Jumlah Amortisasi	Rp -	Rp -	
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 365.820.828	Rp 227.874.549	60,54

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:"

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
1.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	Rp -	Rp -	0,00
2.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	Rp -	Rp -	0,00
	Jumlah	Rp -	Rp -	0,00

Beban Lain-lain Rp0

D.9 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Beban Lain-lain untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DES 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	0,00
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	0,00
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Penyusutan	Rp -	Rp -	0,00

*Kegiatan Non
Operasional Rp0*

D.10 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	PER 31 DES 2024	TAHUN 2023	Naik (Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	
Penjualan Alat Angkutan Darat	Rp -	Rp -	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	
Penjualan Alat Kantor	Rp -	Rp -	0,00
Defisit Selisih Kurs	Rp -	Rp -	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp -	Rp -	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
15.211.461.601,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.211.461.601,- dan Rp. 956.992.279,-

*Surplus (Defisit)
LO (Rp.
47.829.245.729)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp. 47.829.245.729) dan (27.056.900.941)

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp. 0*

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan R (1,396.661) Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	Rp -
Suku Cadang	Rp -
Barang Persediaan Lainnya	Rp 1.396.661
Jumlah	Rp 1.396.661

*Koreksi Aset
Tetap Rp. 0*

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

*Koreksi Atas
Beban Rp. 0*

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:"

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	Rp -
Beban Jasa	Rp -
Jumlah	Rp -

Koreksi Atas
Pendapatan Rp. 0

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	Rp -
Pendapatan Lainnya	Rp -
Jumlah	Rp -

Ekuitas Akhir Rp.
9.192.641.402,-

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.192.641.402,- dan Rp. 15.211.461.601,-

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Alokasi Pagu Dana KPU Kabupaten Paser Tahun 2023

Anggaran APBN KPU Kab. Paser Tahun 2024 sebesar Rp. 14.927.859.000,- dengan DIPA Awal Nomor : SP

Pada KPU Kabupaten Paser ditahun 2022 ini terdapat beberapa Revisi Anggaran adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	NO. DIPA	TANGGAL	PAGU ANGGARAN
1	DIPA AWAL	SP DIPA-076.01.2.658902/2024	24 Nopember 2024	Rp 29.181.302.000,00
2	DIPA REVISI 1	SP DIPA-076.01.2.658902/2024	13 Februari 2024	Rp25.744.490.000,00
3	DIPA REVISI 2	SP DIPA-076.01.2.658902/2024	01 April 2024	Rp25.744.491.000,00
4	DIPA REVISI 3	SP DIPA-076.01.2.658902/2024	31 Mei 2024	Rp38.244.491.000,00
5	DIPA REVISI 4	SP DIPA-076.01.2.658902/2024	12 Juli 2024	Rp38.244.491.000,00
6	DIPA REVISI 5	SP DIPA-076.01.2.658902/2024	19 September 2024	Rp38.657.011.000,00
7	DIPA REVISI 6	SP DIPA-076.01.2.658902/2024	28 Oktober 2024	Rp25.000.000.000,00
8	DIPA REVISI 7	SP DIPA-076.01.2.658902/2024	11 November 2024	Rp25.000.000.000,00
9	DIPA REVISI 8	SP DIPA-076.01.2.658902/2024	17 Desember 2024	Rp25.000.000.000,00
10	DIPA REVISI 9	SP DIPA-076.01.2.658902/2024	23 Desember 2024	Rp25.000.000.000,00
11	DIPA REVISI 10	SP DIPA-076.01.2.658902/2024	27 Desember 2024	Rp21.600.000.000,00
12	DIPA REVISI 11	SP DIPA-076.01.2.658902/2024	14 Januari 2025	Rp21.600.000.000,00

Pada Tanggal 30 Oktober 2023, KPU Kabupaten Paser memperoleh Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 dengan NPHD Nomor: 200.1.5.9/456/BKBP-BID.II/X/2023; Nomor: 338/KU.07-NK/6401/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 29.230.655.000,00, dengan Termin Pencairan dengan 2 Tahap yaitu pada tanggal 15 Nopember 2023 Tahap I sebesar Rp. 12.500.000.000,00 dan Tahap 2 pada tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp. 16.730.655.000,00

Realisasi Belanja Hibah Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 dari 1 April sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp. 2.805.777.400,00. Pada Tanggal 31 Desember 2024 telah Pengesahan Belanja sebanyak 2 kali sebesar Rp. 18.403.429.100,00 dan Rp. 201.280.980,00. Sisa Anggaran Hibah Pilkada KPU Kabupaten Paser Tahun 2024 sebesar Rp.7.820.167.520,00 yang akan direvisikan pada Tahun 2025.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Paser Nomor : 1 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen,Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM dan Bendahara Pengeluaran pada KPU Kab. Paser. antara lain :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Rusdiansyah, SH
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Rully Alviany, SE
3. Pejabat Penandatangan SPM : Endang Porwati, SE
4. Bendahara Pengeluaran : Tatik Siswatiningsih

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (658902) KPU KABUPATEN P A S I R

Tgl Data : 01/05/25 2:22 AM
Tgl Cetak : 01/05/25 8:11 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	7,820,167,520	12,513,271,252	(4,693,103,732)	(37.51)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	135,794,070	316,852,830	(181,058,760)	(57.14)
Persediaan	0	1,518,024,019	(1,518,024,019)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	7,955,961,590	14,348,148,101	(6,392,186,511)	(44.55)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,921,493,940	2,229,736,980	691,756,960	31.02
Gedung dan Bangunan	473,487,000	473,487,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,157,888,738)	(1,792,067,910)	(365,820,828)	20.41
JUMLAH ASET TETAP	1,237,092,202	911,156,070	325,936,132	35.77
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	563,661,500	563,661,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(563,661,500)	(563,661,500)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	9,193,053,792	15,259,304,171	(6,066,250,379)	(39.75)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	412,390	47,842,570	(47,430,180)	(99.14)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	412,390	47,842,570	(47,430,180)	(99.14)
JUMLAH KEWAJIBAN	412,390	47,842,570	(47,430,180)	(99.14)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	9,192,641,402	15,211,461,601	(6,018,820,199)	(39.57)
JUMLAH EKUITAS	9,192,641,402	15,211,461,601	(6,018,820,199)	(39.57)
JUMLAH EKUITAS	9,192,641,402	15,211,461,601	(6,018,820,199)	(39.57)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9,193,053,792	15,259,304,171	(6,066,250,379)	(39.75)

Keterangan :
FINAL

658902, 1 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT
RUSDIANSYAH, SH
NIP. 196908251996031003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
 ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
 SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN P A S I R 658902

Tgl Data : 01/05/25 2:22 AM
 Tgl Cetak : 01/05/25 8:13 AM
 Halaman : 1
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	13,271,252	13,271,252	0	0	6,849,911	6,849,911	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	13,271,252	13,271,252	0	0	6,849,911	6,849,911	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	13,271,252	13,271,252	0	0	6,849,911	6,849,911	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	46,073,490,000	45,802,798,192	(270,691,808)	99.41	28,470,445,000	27,642,319,663	(828,125,337)	97.09
1. Belanja Pegawai	2,431,113,000	2,431,073,527	(39,473)	100.0	2,299,568,000	2,279,701,853	(19,866,147)	99.14
2. Belanja Barang	43,096,177,000	42,825,612,705	(270,564,295)	99.37	26,021,645,000	25,228,335,810	(793,309,190)	96.95
3. Belanja Modal	546,200,000	546,111,960	(88,040)	99.98	149,232,000	134,282,000	(14,950,000)	89.98
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
 ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
 SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN P A S I R 658902

Tgl Data : 01/05/25 2:22 AM
 Tgl Cetak : 01/05/25 8:13 AM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	46,073,490,000	45,802,798,192	(270,691,808)	99.41	28,470,445,000	27,642,319,663	(828,125,337)	97.09
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
 FINAL

658902, 1 Mei 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

 RUSDIANSYAH, SH
 NIP. 196908251996031003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (658902) KPU KABUPATEN P A S I R

Tgl Data : 01/05/25 2:22 AM

Tgl Cetak : 01/05/25 8:12 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	13,271,252	20,120,567	(6,849,315)	(34.041)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	13,271,252	20,120,567	(6,849,315)	(34.041)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	13,271,252	20,120,567	(6,849,315)	(34.041)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,383,470,027	2,279,701,853	103,768,174	4.552
Beban Persediaan	2,948,207,308	103,801,100	2,844,406,208	2,740.247
Beban Barang dan Jasa	34,605,445,319	20,219,719,301	14,385,726,018	71.147
Beban Pemeliharaan	129,739,153	67,564,990	62,174,163	92.021
Beban Perjalanan Dinas	7,551,274,346	4,178,360,311	3,372,914,035	80.723
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (658902) KPU KABUPATEN P A S I R

Tgl Data : 01/05/25 2:22 AM

Tgl Cetak : 01/05/25 8:12 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	365,820,828	227,874,549	137,946,279	60.536
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	47,983,956,981	27,077,022,104	20,906,934,877	77.213
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(47,970,685,729)	(27,056,901,537)	(20,913,784,192)	77.296
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	141,440,000	596	141,439,404	23,731,443.62
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	145,645,000	596	145,644,404	24,436,980.53
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,205,000	0	4,205,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	141,440,000	596	141,439,404	23,731,443.62
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(47,829,245,729)	(27,056,900,941)	(20,772,344,788)	76.773
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(47,829,245,729)	(27,056,900,941)	(20,772,344,788)	76.773

Keterangan :
FINAL

658902, 1 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGUNA ANGGARAN



RUSDIANSYAH, SH
NIP. 196908251996031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (658902) KPU KABUPATEN P A S I R

Tgl Data : 01/05/25 1:09 AM

Tgl Cetak : 01/05/25 8:12 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	15,211,461,601	956,992,279	14,254,469,322	1,489.51
SURPLUS/DEFISIT-LO	(47,829,245,729)	(27,056,900,941)	(20,772,344,788)	76.77
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(13,271,252)	(1,396,661)	(11,874,591)	850.21
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	(1,396,661)	1,396,661	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
LAIN-LAIN	(13,271,252)	0	(13,271,252)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	41,823,696,782	41,312,766,924	510,929,858	1.24
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(6,018,820,199)	14,254,469,322	(20,273,289,521)	(142.22)
EKUITAS AKHIR	9,192,641,402	15,211,461,601	(6,018,820,199)	(39.57)

Keterangan :

FINAL

658902, 1 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RUSDANSYAH, SH
NIP. 196908251996031003